

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara geografis, Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang lokasinya berada di garis katulistiwa. Akibatnya, Indonesia memiliki iklim tropis yang wilayahnya memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Kondisi iklim ini memiliki risiko bencana yang disebut sebagai bencana hidrometeorologi. Menurut Margianto et al. (2021), bencana hidrometeorologi adalah bencana yang disebabkan oleh parameter hidrometeorologi, yakni curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin. Bencana hidrometeorologi ini diantaranya adalah banjir, angin puting beliung, dan longsor.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sepanjang tahun 2022, 99 persen bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi. Sepanjang tahun 2022 terdapat total 3.318 bencana, bencana geologi hanya tercatat 25 kejadian dan sisanya sebanyak 3.293 adalah bencana hidrometeorologi. Diantara banyaknya kejadian bencana hidrometeorologi, yang paling banyak terjadi adalah banjir sebanyak 1.420 kejadian, disusul 989 kejadian cuaca ekstrem, 608 kejadian tanah longsor dan 250 kebakaran hutan dan lahan pada periode yang sama. Ada pula gelombang pasang dan abrasi sebanyak 22 kejadian, serta 4 kejadian kekeringan.

Bencana banjir merupakan suatu peristiwa yang terjadi akibat meluapnya air dari batas tebing sungai dalam jangka waktu relatif pendek atau suatu peristiwa menggenangnya air di permukaan tanah sampai melebihi batas waktu tertentu yang mengakibatkan kerugian terhadap manusia. Di wilayah-wilayah Indonesia, peristiwa bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi dan berulang setiap tahunnya, terutama pada saat musim penghujan. Hingga saat ini, permasalahan banjir belum dapat terselesaikan dan bahkan memiliki kecenderungan untuk meningkat frekuensinya, luasannya, kedalamannya, maupun durasinya (Sandhyavitri et al., 2015).

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi dengan jumlah kejadian banjir yang tinggi, yaitu sebesar 193 jumlah kejadian banjir. Jumlah kejadian banjir

yang terbesar berada di Kabupaten Bandung. Tercatat dari 193 kejadian di tahun 2022, 50 kejadian diantaranya terjadi di Kabupaten Bandung. Menurut Sudradjat et al. (2020) banjir di Kabupaten Bandung disebabkan oleh tingginya angka urbanisasi wilayah, buruknya pengolahan limbah di bantaran sungai Citarum, serta perubahan iklim yang melanda.

Menurut Bakti et al. (2017) terjadinya bencana banjir ini sebenarnya terbagi menjadi dua faktor, yakni faktor alam dan faktor manusia. Bisa dikatakan bahwa banjir bukan hanya persoalan tingginya curah hujan dan pendangkalan sungai citarum, namun juga menyangkut kebijakan pembangunan yang lebih mengedepankan sektor ekonomi, sedangkan peran ekologi dan sosial dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Budimansyah et al. (2018) yang menyatakan bahwa dalam perkembangannya, bantaran sungai Citarum mengalami eksplorasi yang cenderung membabi buta terutama pada pertengahan 1980-an, terutama pada saat era pembangunan industrialisasi. Pada saat itu tidak ada konsep tata ruang yang jelas dimana terdapat pembangunan dan ekspansi besar-besaran dari pemilik modal di Bandung dikarenakan perkembangan pertumbuhan perumahan yang sangat pesat. Penyebab terbesarnya adalah terganggunya fungsi dan eksistensi hulu sungai yang sebesar 80.000 hektar area hanya tersisa 8,9 persen yang masih menyokong untuk mata air. Status ini sangat berdampak kepada munculnya bencana banjir karena tidak terserapnya air oleh pepohonan yang sudah menghilang.

Selain itu, peningkatan jumlah penduduk yang tinggi memicu usaha untuk memperlebar wilayah pemukiman sehingga tidak sejalan lagi dengan daya dukung lingkungan yang ada. Buruknya perencanaan dan majemen tata kota ini juga berbanding lurus dengan hilangnya vegetasi akibat penebangan. Akibatnya, tanah kehilangan kemampuannya untuk menyerap air hujan, dan banjirpun terjadi. Ditambah, daerah aliran sungai (DAS) Citarum Hulu mengalami degradasi yang cukup parah sehingga terkategori sebagai salah satu DAS kritis di Indonesia (Irawan et al., 2018).

Lebih lanjut, ditinjau dari faktor alamnya, secara fisiografis pada lahan DAS Citarum khususnya pada bagian hulu terlihat seperti cekungan raksasa. Cekungan ini lebih dikenal sebagai cekungan Bandung. Cekungan ini dibentuk karena daerah

pegunungan dan perbukitan yang berada disekeliling DAS dengan wilayah dataran dibagian tengah. Fisiologi lahan ini menyebabkan hujan dan aliran permukaan pada wilayah pegunungan sekitarnya mengalir ke dalam DAS sehingga menghasilkan banjir di sisi kanan dan kiri sungai (Muin et al., 2015). Karenanya ketika musim hujan tiba, tingginya debit air di DAS Citarum menyebabkan banjir tahunan yang melanda beberapa kecamatan terutama yang berada disekitaran cekungan Bandung.

Kecamatan Baleendah memiliki kondisi morfologi relatif datar dengan kemiringan lereng 0%-3%. Ditinjau dari sejarah geografisnya, Kecamatan Baleendah merupakan dasar dari danau Bandung purba, sehingga pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi, banjirpun terjadi (Hasanah et al., 2021). Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Mazlan et al. (2020) menyatakan bahwa dari 8 desa yang ada di Kecamatan Baleendah, hanya satu desa saja yang dinyatakan rawan terhadap banjir, yaitu Desa Andir. Hal ini dikarenakan kondisi fisik geografis Desa Andir yang memiliki elevasi rendah serta dilewati oleh dua sungai, yakni Sungai Cisangkuy dan Sungai Citarum yang berkelok tajam. Sehingga, kondisi pertemuan dua sungai seperti inilah yang menyebabkan banyaknya kejadian genangan banjir akibat luapan air, terutama disetiap musim penghujan.

Banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai dapat mencapai tinggi hingga 3 meter (Azhari et al., 2016). Selain itu, DAS Citarum yang berkelok sedang, gradient sungai yang rendah, serta potensi sedimentasi tinggi turut memperparah banjir tahunan yang terjadi di daerah Desa Andir. Dikutip dari Uden (2022), hingga Oktober 2022 hujan lebat yang terjadi selama 2 hari mengakibatkan banjir setinggi 1,5 meter yang melanda 1000 hektar lahan yang ditempati 550 Kepala Keluarga.

Menurut Diposaptono (2011), sebenarnya, penyebab utama banjir masih didominasi oleh ulah manusia. Jika aspek ekologis terjaga dengan baik, sebanyak apapun air dari hujan yang turun umumnya akan mengikuti siklus air, mengalir menuju sungai, terserap tanah, dan mengalami penguapan. Namun, berbagai macam kegiatan yang dilakukan manusia tanpa mempertimbangkan aspek ekologi mengganggu siklus air. Penggundulan hutan akan mengakibatkan rendahnya kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Akibatnya, ketika air mengguyur kawasan itu maka air akan mengalir dan mengumpul di tempat yang lebih rendah. Hal ini akan diperparah dengan buruknya kondisi aliran sungai. Sungai yang

dipenuhi oleh sampah akan mengakibatkan pendangkalan, sehingga air sungai pun meluap. Selain sampah, sungai juga mengalami pendangkalan hebat sebagai akibat erosi tanah, khususnya jika sungai terletak di daerah hulu. Hal ini selaras dengan kejadian banjir yang diakibatkan dari buruknya sistem saluran pembuangan di rumah-rumah warga, sebab saluran pembuangan ini terhubung secara langsung dengan Sungai Cisangkuy sebagai anak Sungai Citarum. Ketika air di Sungai Cisangkuy tinggi, maka air mengalir ke rumah-rumah warga melalui saluran pembuangan (Husodo, 2022).

Menurut Hasanah et al. (2021) selain permasalahan dari saluran sungai, permasalahan lain yang menimbulkan banjir di Baleendah disebabkan oleh alih fungsi lahan serapan air yang menjadi bangunan, baik di hulu maupun di daerah pinggiran sungai dimana seharusnya tidak di perbolehkan adanya pembangunan. Perubahan tata guna lahan menjadi lahan nonvegetasi akibat penggundulan hutan menjadi penyebab utama erosi. Fenomena ini akan diperparah lagi dengan kondisi badan sungai yang mengalami penyempitan akibat bangunan-bangunan liar yang dibangun sepanjang bantaran sungai.

Selain itu, kota yang dibalut oleh hamparan aspal, semen, dan beton membuat air hujan tak mampu meresap ke dalam tanah. Daerah yang tadinya memiliki fungsi sebagai resapan air kemudian dialihfungsikan menjadi permukiman, pertokoan, mall, perkantoran, industri dan lain-lain. Akibatnya, memperbesar aliran permukaan dari hujan yang akhirnya menyebabkan banjir kian parah dan meluas. Selain itu, penyedotan air tanah secara berlebihan tanpa diiringi dengan penyerapan juga memberi kontribusi terhadap banjir. Terkurusnya air tanah ini akan mengakibatkan tanah ambles dan menimbulkan cekungan, sehingga terbentuklah genangan.

Buruknya drainase juga punya andil besar terjadinya banjir dalam skala lokal. Terlebih jika saluran pembuangan air tak berfungsi sebagaimana mestinya karena terisi oleh sampah-sampah plastik, kaleng, kertas, daun, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan pembangunan dan pengembangan lahan nonvegetasi yang tidak dilengkapi dengan prasarana drainase yang memadai akan memperparah keadaan banjir. Pertambahan jumlah penduduk, ketidakteraturan desain tata ruang perkotaan, tidak tersedianya sarana prasarana perkotaan, dan pemanfaatan tata guna

lahan yang tidak tertib mengakibatkan peningkatan permasalahan banjir, khususnya di wilayah padat penduduk. Jumlah penduduk yang semakin tahun semakin bertambah karena proses urbanisasi ataupun penduduk tetap yang tidak diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan banjir akan semakin memperburuk permasalahan banjir.

Walaupun mengalami kerugian akibat banjir tahunan yang terus melanda, pertambahan penduduk serta urbanisasi masih memaksa masyarakat terus tinggal dan memadati Desa Andir, bahkan di wilayah sekitaran DAS Citarum. Salah satu alasan penting yang membuat masyarakat untuk bertahan di area ini adalah pekerjaan. Dengan adanya kawasan industri dan pasar harian, wilayah tersebut masih dinilai sebagai kawasan yang strategis untuk tinggal dan menetap. Selain itu, penyebab masyarakat masih bertahan dan tinggal di Desa Andir dikarenakan kebanyakan masyarakat merupakan warga asli dari daerah tersebut, serta memiliki status kepemilikan tanah yang kebanyakan merupakan warisan.

Selain itu, masyarakat yang terdampak banjir telah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi banjir tahunan yang terus melanda sebagai bentuk upaya untuk menetap dan tinggal. Alasan lebih lanjut adalah keterikatan masyarakat dalam bergotong-royong dan bahu membahu dalam menghadapi banjir sudah mengakar. Biasanya, setelah kejadian banjir selesai, masyarakat membersihkan dan menata rumah kembali serta bergotongroyong untuk membersihkan jalan-jalan dan fasilitas umum lainnya. (Nurhasanah et al., 2019). Oleh karena itu, antisipasi bencana banjir serta penyusunan manajemen risiko mutlak diperlukan masyarakat Desa Andir yang tujuannya untuk mereduksi kerugian akibat banjir.

Dengan padatnya permukiman di daerah Andir serta kejadian banjir tahunan yang terus terjadi, pemerintah daerah Kabupaten Bandung menerbitkan perda nomor 02 tahun 2013 sebagai bentuk upaya untuk menanggulangi bencana, serta diharapkan mampu menjadi solusi dalam memecahkan permasalahan banjir di kabupaten Bandung. Namun, implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir ini belum berjalan dengan maksimal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhammad & Aziz (2020), dimana pada pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi. Diantaranya adalah pelaksanaan

pembuatan tanggul dinilai belum maksimal sehingga masih terdapat upaya untuk perbaikan tanggul yang rusak dikarenakan banyaknya volume limpasan air yang datang. Banyaknya volume limpasan ini diakibatkan oleh proses pendangkalan sungai akibat sedimentasi, sehingga dilakukanlah upaya peninggian tanggul yang sayangnya tidak diiringi oleh pengerukan sungai.

Kurangnya personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga menyebabkan sulitnya pemerintah dalam menetapkan status tanggap darurat. Selain itu, pengangkatan personil hanya dilakukan dan dibentuk pada saat mendekati waktu bencana datang. Selain itu, pengangkatan personil yang didapatkan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dinilai kurang memiliki kompetensi dalam bidang kebencanaan sehingga masih perlu dilakukan pelatihan secara berkesinambungan untuk dapat terjun di lapangan.

Minimnya anggaran yang dialokasikan pemerintah dalam APBD untuk mengatasi seluruh kejadian bencana di Kabupaten Bandung menyebabkan terbatasnya upaya penanggulangan kejadian bencana, seperti terbatasnya pengadaan fasilitas, terutama sarana dan prasarana penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heryati (2020), yang menyatakan bahwa selain permasalahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, masalah keterbatasan anggaran, SDM, dan sarana-prasarana, serta lemahnya koordinasi antar sektor juga turut menghambat pemerintah dalam mengatasi bencana di Kabupaten Bandung.

Menurut Tuladhar et al. (2015), potensi risiko kerugian akibat bencana adalah kematian, turunnya kondisi kesehatan, hilangnya mata pencaharian, dan potensi kerusakan pada aset, baik milik pribadi maupun serta layanan fasilitas umum. Potensi kerugian bencana ini bisa berupa korban jiwa dari penduduk, hancurnya infrastruktur, permukiman, bangunan pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial, dan ekonomi, serta bangunan-bangunan pemerintah. Ini semua memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kondisi psikologis dan tingkat kesejahteraan setiap anggota masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muin et al. (2015) mengenai kerugian materi akibat banjir di Citarum Hulu, kerugian sektor pemukiman akibat banjir memiliki angka lebih tinggi ketimbang dengan kerugian di sektor pertanian. Untuk

seluruh kawasan Citarum Hulu, kerugian sektor pemukiman ditaksir mencapai Rp. 600 - 700 miliar, sementara kerugian pada sektor pertanian karena gagal panen mencapai angka Rp. 68 miliar setiap tahunnya. Belum lagi kerugian non materi seperti pengaruh psikologis dan kecemasan yang diakibatkan oleh kerugian dari harta benda, penyakit yang muncul, lenyapnya lapangan pekerjaan, serta hilangnya tempat tinggal akibat bencana banjir juga turut memengaruhi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama saat banjir menerjang.

Selain kerugian materi, banjir juga memengaruhi masyarakat secara sosial. Dengan adanya kejadian banjir, masyarakat mulai menormalisasi kejadian banjir sebagai aktivitas tahunan. Banyak orang tua yang mengizinkan anaknya untuk bermain dengan genangan banjir, sehingga terjadi peningkatan penyakit kulit dan diare saat banjir terjadi. Ada juga sebagian masyarakat yang merasa tidak berdaya sehingga memilih untuk meminta-minta uang di pinggir jalan raya. Kejadian banjir tahunan membentuk mental sebagian penduduk sebagai penerima yang meyakini bantuan yang akan selalu datang seiring dengan terjadinya banjir.

Kondisi tersebut mengubah pandangan sebagian masyarakat yang menganggap banjir bukan lagi sebagai bencana, melainkan sebagai ajang untuk meraup keuntungan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhamad et al. (2017) mengenai modal sosial masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Bandung yang mengungkapkan bahwa kehadiran LSM dan pemerintah yang membantu korban banjir cukup membantu tetapi disisi lain mendorong terjadinya ketidakpedulian serta ketergantungan dengan bantuan yang diberikan oleh pihak luar.

Setiap kejadian bencana, anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban dan paling menderita daripada orang dewasa. Mereka belum bisa menyelamatkan diri sendiri, sehingga peluang menjadi korban lebih besar. Sebagai akibatnya mereka mengalami trauma fisik dan psikis yang salah satunya karena kehilangan orang tua dan keluarganya; selain itu, keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti pangan, mengakibatkan kurangnya gizi. Belum lagi pelayanan kesehatan, sanitasi, dan air bersih di tempat penampungan dan pengungsian yang terbatas mengakibatkan mereka mudah terserang berbagai macam penyakit. Lalu, dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan,

perolehan informasi dan hiburan dari televisi, radio, telepon dan surat kabar, serta risiko tindak kekerasan seperti menjadi sasaran perdagangan anak dan pengiriman keluar daerah bencana.

Untuk mencegah risiko tersebut, keluarganya yang harus bersiap dengan menyediakan kebutuhan selama terjadi bencana dan bekerjasama dengan tetangga sebagai suatu tim regu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi et al. (2019) mengenai perencanaan pengurangan risiko bencana yang harus terdiri dari perkiraan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam keadaan darurat dan identifikasi atas sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, mengetahui apa yang dapat dilakukan oleh setiap keluarga untuk perlindungan anak dan tanggung jawab mereka. Hal ini yang dapat dilakukan melalui belajar lebih banyak mengenai kesiapan keluarga dalam menghadapi bencana. Sehingga, penting bagi setiap anggota keluarga yang bergerak sebagai unit satuan masyarakat untuk dapat mengimplementasikan dan memiliki pengetahuan mengenai pengurangan risiko bencana.

Pengetahuan tentang risiko bencana ini adalah serangkaian kegiatan yang harus diketahui untuk mengantisipasi situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan kondisi suatu masyarakat, baik secara individu maupun kelompok yang memiliki kemampuan secara fisik dan psikis dalam menghadapi bencana (Djafar, 2016).

Menurut Takeuchi (2015), pengetahuan yang cukup dalam bencana diperlukan sebagai bekal keterampilan untuk membantu diri sendiri dan membantu orang lain. Kekuatan hubungan, konsep bertetangga, peran, dan tanggung jawab, kewajiban, dan timbal balik, sebagaimana ditransmisikan melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup memainkan peran penting dalam mengadvokasi pendidikan bencana, khususnya melalui keluarga sebagai strategi utama untuk pendidikan bencana, dan bagaimana caranya memanfaatkan dan membuat operasi jaringan ini efektif, karena ini memiliki potensi untuk memobilisasi tindakan pengurangan risiko bencana secara massa. Kesadaran mengenai kesiapsiagaan terhadap bencana akan bervariasi, tergantung dengan karakteristik serta perannya didalam komunitas masyarakat (Gerdan, 2014).

Walaupun bervariasi, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam di masyarakat akan sangat bergantung satu sama lain sebagai satu kesatuan secara menyeluruh. Oleh karena itu, masyarakat terutama keluarga sebagai unit terkecil dirasa perlu untuk memiliki pemahaman risiko bencana sehingga dapat mengetahui bagaimana harus merespon terutama dalam menghadapi situasi darurat bencana.

Pada situasi darurat diperlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat untuk mengurangi risiko. Seluruh anggota keluarga harus membuat kesepakatan bersama agar lebih siap menghadapi situasi darurat bencana. Rencana kesiapsiagaan keluarga (*family preparedness plan*) harus disusun dan dikomunikasikan dengan anggota keluarga di rumah, kerabat yang ada dalam daftar kontak darurat, serta mempertimbangkan sistem yang diterapkan lingkungan sekitar dan pihak berwenang. Skenario kejadian dibuat bersama oleh seluruh anggota keluarga dan berbagi peran dalam setiap skenarionya sesuai jenis bahaya yang mengancam. Bila rencana sudah disepakati, keluarga perlu melakukan simulasi secara berkala agar tidak panik dalam situasi darurat (Tim BNPB, 2018).

Hasil penelitian mengenai kesiapsiagaan bencana banjir yang dilakukan oleh Ao et al. (2020), menyebutkan bahwa responden yang lebih senior serta lebih berpendidikan, dan lebih lama tinggal akan menunjukkan kesiapsiagaan yang lebih matang dalam menghadapi bencana. Oleh karenanya, usia merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pengetahuan seseorang tentang pengalaman terhadap terjadinya bencana dan kesadaran kepala keluarga yang mengakses informasi baik melalui pelatihan bencana maupun media informasi yang dapat memengaruhi pengetahuan. Semakin tua usia seseorang, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh individu (Setyaningrum, 2018).

Kepala keluarga adalah salah satu bagian yang memiliki posisi penting didalam keluarga. Kepala keluarga dianggap menjadi sosok dewasa yang telah berpengalaman dan seluruh keputusan yang ia ambil akan memengaruhi keluarga. Kepala keluarga bertanggungjawab untuk memberikan pemahaman dan kesadaran akan bencana alam dapat dengan mudah mencapai rumah dan anggota keluarga (Said dkk, 2011). Seorang kepala keluarga harus mampu membimbing anggota keluarganya dalam segala hal untuk menjadi keluarga yang bermutu dan penuh kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat (Hidayatullah, 2015).

Kepala keluarga sebagai pemimpin dalam keluarga memiliki peran penting dalam mengatur anggota keluarganya, karena sikap serta keputusan yang diambil oleh seorang kepala keluarga, akan memengaruhi anggota keluarga lainnya dalam pengambilan keputusan, perencanaan, serta implementasi dalam melakukan suatu tindakan (Ramadhan & Kartinah, 2021). Pengetahuan anggota keluarga juga akan bergantung kepada kepala keluarga yang memiliki peranan penting dalam penyampaian informasi dan menentukan kebijakan yang akan diterapkan, terutama jika berkaitan dengan rumah tangga (Yulianti et al., 2021).

Kepala keluarga dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memimpin dan membimbing anggota keluarganya dalam mempersiapkan setiap kemungkinan terburuk, termasuk dengan kemungkinan adanya bencana alam. Jika kepala keluarga tidak memiliki pengetahuan pengurangan bencana yang mencukupi, maka besar kemungkinan berakibat pada kerugian bersama yang akan berdampak pada seluruh anggota keluarga akibat kurangnya persiapan untuk menghadapi bencana. Hal ini dikarenakan karena peran yang dipegang kepala keluarga yang menempati posisi paling dominan dalam sebuah keluarga karena dianggap dapat memengaruhi keputusan dalam keluarga.

Dari fakta dan data yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pengetahuan Pengurangan Risiko Bencana Banjir terhadap Kesiapsiagaan Kepala Keluarga di Desa Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang diajukan peneliti adalah:

1. Banjir tahunan yang membentuk mentalitas dan kebudayaan masyarakat Desa Andir untuk tinggal menetap dan menunggu bantuan.
2. Belum tersedianya sistem peringatan bencana yang efektif di daerah rawan bencana.
3. Sulitnya akses dan mobilisasi untuk mencapai posko ketika kondisi darurat bencana.
4. Implementasi kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengantisipasi bencana belum berjalan maksimal.

5. Kurangnya personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyebabkan sulitnya pemerintah dalam menetapkan status tanggap darurat.
6. Penanganan banjir yang dibuat pemerintah hanya berorientasi sebagai respon terjadinya bencana.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembahasan penelitian ini hanya terbatas pada penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan mengenai pengurangan risiko bencana banjir terhadap kesiapsiagaan kepala keluarga dalam menghadapi bencana di Desa Andir.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah yang akan diajukan oleh peneliti adalah apakah ada pengaruh antara pengetahuan pengurangan risiko bencana banjir terhadap kesiapsiagaan kepala keluarga Desa Andir dalam menghadapi bencana?

1.5. Kegunaan Hasil Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Memberi sumbangsih ilmu pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction knowledge*) terhadap kepala keluarga terhadap kesiapsiagaan mereka dalam bencana (*general disaster preparedness*).

1.5.2. Kegunaan Praktis

Manfaat dan kegunaan praktis yang didapat setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan mengenai kesiapsiagaan kepala keluarga dalam menghadapi bencana, serta mampu menerapkan ilmu teoritis yang didapat dalam bangku perkuliahan.

2. Bagi Anggota Keluarga

Anggota keluarga sebagai unit terkecil dalam keluarga diharapkan untuk mendukung satu sama lain dan mendapat informasi tambahan tidak hanya mengenai pengetahuan mengenai risiko banjir, namun juga penerapan ilmu dalam menghadapi banjir.

3. Bagi Kepala Keluarga

Kepala keluarga sebagai subjek penelitian diharapkan mendapat sumbangsih berupa ilmu dan pengetahuan mengenai pengetahuan risiko bencana banjir dan mampu meningkatkan kesiapsiagaannya, bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga mengajak anggota keluarganya untuk lebih siap dalam menghadapi bencana.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai satu kesatuan mendapatkan sumbangan ilmu pengetahuan sebagai suatu referensi dalam meningkatkan pengetahuan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir.

5. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun suatu program peningkatan pengetahuan mengenai risiko bencana banjir dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

